

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO

Ahmad Taufik Podungge

NPP. 30.1316

Asdaf Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Program Studi Keuangan Publik

Email: ahmadtaufik12338@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Marja Sinurat, M.Pd., MM.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Achievements achieved by an organization in a certain period can be assessed from performance. Performance is the result of work that has been achieved in order to achieve the goals, objectives and vision and mission of the organization. Knowing the performance achievements that have been made by the organization can be used as a tool to evaluate the organization and provide feedback so that continuous improvement efforts occur to achieve future goals. The Balancing Fund of Gorontalo Regency still dominates regional revenue compared to regional original income. The data indicates that the regional government of Gorontalo is still highly dependent on the central government. so that the need for Regional Financial Performance Analysis to obtain a clear picture of the financial performance of Gorontalo Regency. **Purpose:** This study aims to analyze and obtain a clear picture of the financial performance of Gorontalo Regency in 2017-2021

Methods: This study uses Mahmudi's theory to measure the level of regional financial performance using five ratios, namely financial independence, growth, effectiveness, efficiency and degree of decentralization. The research approach used is qualitative research with descriptive methods. Data collection techniques through interviews and documentation.

Results/Findings: The research results show that the financial performance of Gorontalo Regency is classified as low based on the results of a very low Financial Independence Ratio, a low Growth Ratio, a moderately effective effectiveness ratio, a less Efficiency Ratio and less Decentralization Degree. **Conclusion:** The Financial Performance of Gorontalo Regency is classified as low. the inhibiting factors are the collection of regional taxes and fees that have not been optimal, the regional potential has not been utilized optimally and the dependence of the Regional Government of Gorontalo Regency on transfer funds. The supporting factors are related to the implementation of regional original revenue collection.

Keywords: financial performance, financial ratios, budget realization

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Prestasi yang dicapai oleh sebuah organisasi dalam periode tertentu dapat dinilai dari kinerja. Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dalam rangka mencapai tujuan, sasaran dan visi misi organisasi. Mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi organisasi dan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang. Dana Perimbangan Kabupaten Gorontalo masih mendominasi penerimaan daerah dibanding pendapatan asli daerah. Data tersebut mengindikasikan masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo terhadap pemerintah pusat. sehingga perlunya Analisis Kinerja Keuangan Daerah untuk

memperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021

Metode: Penelitian ini menggunakan teori Mahmudi untuk mengukur tingkat kinerja keuangan daerah dengan menggunakan lima rasio, yaitu kemandirian keuangan, pertumbuhan, efektivitas, efisiensi dan derajat desentralisasi. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui Wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo tergolong rendah berdasarkan hasil Rasio Kemandirian Keuangan yang sangat rendah, Rasio Pertumbuhan yang rendah, Rasio efektivitas yang cukup efektif, Rasio Efisiensi yang kurang dan Derajat Desentralisasi kurang. **Kesimpulan:** Kinerja Keuangan Kabupaten Gorontalo yaitu tergolong rendah. faktor penghambatnya adalah pemungutan pajak dan retribusi daerah belum optimal, potensi daerah belum dimanfaatkan secara optimal serta ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo terhadap dana transfer. Adapun faktor pendukungnya adanya terkait pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: kinerja keuangan, rasio keuangan, realisasi anggaran Kata kunci

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prestasi yang dicapai oleh sebuah organisasi dalam periode tertentu dapat dinilai dari kinerja. Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dalam rangka mencapai tujuan, sasaran dan visi misi organisasi. Mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi organisasi dan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang.

Analisis kinerja keuangan dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012: 2). Pengukuran kinerja yang dilakukan bersumber dari informasi finansial yakni laporan keuangan, dan diukur berdasarkan pada anggaran yang sudah dibuat (Mardiasmo, 2018: 123).

Pemerintah daerah dalam menganalisis Kinerja Keuangan menjadi poin penting serta topik yang menarik untuk diteliti. Dengan meneliti kinerja keuangan pemerintah dapat diketahui hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah pemerintah tersebut sudah baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan. Berikut tabel Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021 disajikan pada tabel 1.

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)
2017	190.428.308.121,81	1.062.542.218.683,00	1.259.472.875.908,81
2018	147.992.401.409,49	1.081.287.626.729,00	1.457.052.397.138,49
2019	155.465.564.155,41	1.283.181.447.340,00	1.499.154.604.216,41
2020	128.156.477.764,68	984.033.760.073,00	1.408.590.213.911,88
2021	122.467.826.370,92	1.172.271.662.111,00	1.351.193.921.844,92

Sumber: Badan Keuangan Kab. Gorontalo (Data Diolah Peneliti, 2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan data pada Badan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, pada posisi pendapatan menunjukkan bahwa dana perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibanding pendapatan asli daerah. Data tersebut mengindikasikan masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo terhadap pemerintah pusat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan rendahnya kinerja keuangan di Kabupaten Gorontalo. Beberapa faktornya yaitu belum maksimalnya pemungutan dan pengelolaan atas setiap sumber pendapatan asli daerah, kemudian kurang optimalnya pemanfaatan berbagai potensi daerah yang ada, serta ketergantungan terhadap dana transfer.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Mega Oktavia Ropa berjudul *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan* (Mega Oktavia Ropa, 2016), Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, dan rasio pertumbuhan baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan, dan kurang baik untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan. Dengan demikian, kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan analisis rasio keuangan cukup baik. Penelitian Erna dan Wayan menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa tergolong rendah sekali, rata-rata tingkat efektivitas PAD dari tahun 2010-2012 tergolong kurang efektif, rata-rata tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sumbawa tergolong tidak efisien, rata-rata tingkat pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif, tingkat proporsi pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan kontribusi terbesar untuk pendapatan daerah ditempati oleh Dana Perimbangan, sedangkan kontribusi terbesar untuk belanja daerah ditempati oleh belanja tidak langsung, dan rata-rata tingkat belanja daerah pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012 tergolong ekonomis (Erna Rahmawati dan I Wayan Putra, 2016). Penelitian Masita menemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah (Masita Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas, 2014). Hasil penelitian Fathiyah dan Masnun yang berjudul *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya Basis AkruaI Tahun 2014-2015* menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi yang diukur dengan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio leverage masih dalam kategori baik dan dalam batas aman karena nilai semua rasio berada di atas standar industri, walaupun pada tahun 2015 terjadi penurunan pada semua rasio nilai karena pada tahun tersebut Pemerintah Provinsi Jambi telah menerapkan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan sehingga terjadi penurunan pada pos aset yaitu pada pos aset lancar karena penyisihan piutang dan pada pos aset tetap karena penyusutan aset tetap. Penurunan nilai aset secara otomatis menyebabkan penurunan kinerja keuangannya (Fathiyah dan Masnun, 2017).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode kuantitatif serta berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana penelitian ini berfokus untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah selama periode tahun 2017-2021 dan untuk mengetahui faktor penghambat serta faktor pendukung kinerja keuangan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021

II. METODE

Penelitian ini menggunakan analisis kinerja keuangan yang mempunyai indikator yaitu rasio kemandirian keuangan, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio derajat desentralisasi (Mahmudi, 2016). Penulis mengumpulkan data berupa data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data primer, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan. Adapun pengumpulan data sekunder melalui data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017-2021.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo menggunakan rasio kemandirian keuangan, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio derajat desentralisasi serta mengkaji faktor penghambat dan pendukung kinerja keuangan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Berikut merupakan perhitungan rasio kemandirian Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021.

$$\text{Tahun 2017} = \frac{190.428.308.121,81}{1.062.542.218.683,00} \times 100\% = 17,92195216\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{147.992.401.409,49}{1.081.287.626.729,00} \times 100\% = 13,68668223\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{155.465.564.155,41}{1.283.181.447.340,00} \times 100\% = 12,11563372\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{128.156.477.764,68}{984.033.760.073,00} \times 100\% = 13,02358547\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{122.467.826.370,92}{1.172.271.662.111,00} \times 100\% = 10,44705168\%$$

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, diperoleh besarnya rasio kemandirian daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2017-2021

Tabel 2 Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian Daerah	Klasifikasi Kemandirian daerah
2017	190.428.308.121,81	1.062.542.218.683,00	17,92%	Sangat Rendah
2018	147.992.401.409,49	1.081.287.626.729,00	13,68%	Sangat Rendah
2019	155.465.564.155,41	1.283.181.447.340,00	12,11%	Sangat Rendah
2020	128.156.477.764,68	984.033.760.073,00	13,02%	Sangat Rendah
2021	122.467.826.370,92	1.172.271.662.111,00	10,44%	Sangat Rendah

Sumber: BKAD Kabupaten Gorontalo (Data Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kemandirian Kabupaten Gorontalo selama tahun 2017-2021 dikatakan masih sangat rendah. Pemerintah pusat masih sangat berperan penting dalam memberikan kontribusi bagi daerah Kabupaten Gorontalo. Dilihat dari jumlah pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun Kabupaten Gorontalo cenderung mengalami penurunan, hal ini menunjukkan tingkat bantuan dari pusat berperan penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam menjalankan otonomi daerahnya.

3.2. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PAD_{t1} - PAD_{t0}}{PAD_{t0}} \times 100\%$$

Berikut merupakan perhitungan rasio pertumbuhan Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021.

$$\text{Tahun 2017} = \frac{190.428.308.121,81 - 125.271.076.533,68}{125.271.076.533,68} \times 100\% = 52,01298926\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{147.992.401.409,49 - 190.428.308.121,81}{190.428.308.121,81} \times 100\% = -22,28445294\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{155.465.564.155,41 - 147.992.401.409,49}{147.992.401.409,49} \times 100\% = 5,049693548\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{128.156.477.764,68 - 155.465.564.155,41}{155.465.564.155,41} \times 100\% = -17,56600347\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{122.467.826.370,92 - 128.156.477.764,68}{128.156.477.764,68} \times 100\% = -4,438832506\%$$

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, diperoleh besarnya rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Gorontalo tahun 2017-2021

Tabel 3 Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi PAD t_1	Realisasi PAD t_0	Rasio Pertumbuhan	Kriteria Pertumbuhan
2017	190.428.308.121,81	125.271.076.533,68	52,01%	Tinggi
2018	147.992.401.409,49	190.428.308.121,81	-22,28%	Sangat Rendah
2019	155.465.564.155,41	147.992.401.409,49	5,04%	Sangat Rendah
2020	128.156.477.764,68	155.465.564.155,41	-17,56%	Sangat Rendah
2021	122.467.826.370,92	128.156.477.764,68	-4,43%	Sangat Rendah

Sumber: BKAD Kabupaten Gorontalo (Data Diolah Peneliti, 2023)

Pada uraian dan hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, kinerja keuangan pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo cenderung tumbuh secara negatif dan dapat dikategorikan rendah dari tahun 2017-2021. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo tergolong rendah dalam merealisasikan setiap potensi pendapatan asli daerah yang muncul dari proses pertumbuhan ekonomi.

3.3. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang telah dianggarkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Berikut merupakan perhitungan rasio efektivitas Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021.

$$\text{Tahun 2017} = \frac{190.428.308.121,81}{172.762.057.552,00} \times 100\% = 110,22577\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{147.992.401.409,49}{199.301.061.896,00} \times 100\% = 74,2557014\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{155.465.564.155,41}{168.371.380.186,00} \times 100\% = 92,33491107\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{128.156.477.764,68}{182.581.218.392,00} \times 100\% = 70,19149006\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{122.467.826.370,92}{145.350.952.728,00} \times 100\% = 84,25663821\%$$

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, diperoleh besarnya rasio efektivitas Kabupaten Gorontalo tahun 2017-2021

Tabel 4 Perhitungan Rasio Efektivitas Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas	Tingkat Efektivitas
2017	190.428.308.121,81	172.762.057.552,00	110,22%	Sangat Efektif
2018	147.992.401.409,49	199.301.061.896,00	74,25%	Kurang Efektif
2019	155.465.564.155,41	168.371.380.186,00	92,33%	Efektif
2020	128.156.477.764,68	182.581.218.392,00	70,19%	Kurang Efektif
2021	122.467.826.370,92	145.350.952.728,00	84,25%	Cukup Efektif

Sumber: BKAD Kabupaten Gorontalo (Data Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil rasio efektivitas yang didapat pada tahun 2017 hingga 2021 adalah fluktuatif. Hasil rasio efektivitas tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 110,22% dan terendah pada tahun 2020 yaitu 70,19%. Rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo rata rata menunjukkan 86,25% hal ini mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam merealisasikan pendapatan asli daerah cukup efektif.

3.4. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dalam rasio efisiensi, semakin kecil nilai rasio yang didapatkan, maka semakin efisien kinerja pemerintah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berikut merupakan perhitungan rasio efisiensi Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021.

$$\text{Tahun 2017} = \frac{1.276.223.279.128,80}{1.259.472.875.908,81} \times 100\% = 101,3299535\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.451.790.060.201,70}{1.457.052.397.138,49} \times 100\% = 99,63883681\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.542.630.736.787,48}{1.499.154.604.216,41} \times 100\% = 102,9000433\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{1.392.206.507.241,16}{1.408.590.213.911,88} \times 100\% = 98,83687204\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{1.541.309.144.839,65}{1.351.193.921.844,92} \times 100\% = 114,0701656\%$$

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, diperoleh besarnya rasio efisiensi Kabupaten Gorontalo tahun 2017-2021

Tabel 5 Perhitungan Rasio Efisiensi Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi	Tingkat Efisiensi
2017	1.276.223.279.128,80	1.259.472.875.908,81	101,32%	Tidak Efisien
2018	1.451.790.060.201,70	1.457.052.397.138,49	99,63%	Kurang Efisien
2019	1.542.630.736.787,48	1.499.154.604.216,41	102,90%	Tidak Efisien
2020	1.392.206.507.241,16	1.408.590.213.911,88	98,83%	Kurang Efisien
2021	1.541.309.144.839,65	1.351.193.921.844,92	114,07%	Tidak Efisien

Sumber: BKAD Kabupaten Gorontalo (Data Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan penelitian yang didapat, hasil rasio efisiensi yang didapat pada tahun 2017 hingga tahun 2021 cenderung tidak efisien. Hal ini menandakan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo kurang efisien.

3.5. Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi didapatkan dengan menghitung perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyeleggarakan desentralisasi. Berikut merupakan perhitungan derajat desentralisasi Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021.

$$\text{Tahun 2017} = \frac{190.428.308.121,81}{1.259.472.875.908,81} \times 100\% = 15,11968314\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{147.992.401.409,49}{1.457.052.397.138,49} \times 100\% = 10,15697182\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{155.465.564.155,41}{1.499.154.604.216,41} \times 100\% = 10,37021557\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{128.156.477.764,68}{1.408.590.213.911,88} \times 100\% = 9,098208727\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{122.467.826.370,92}{1.351.193.921.844,92} \times 100\% = 9,06367505\%$$

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti, diperoleh besarnya derajat desentralisasi Kabupaten Gorontalo tahun 2017-2021.

Tabel 6 Perhitungan Derajat Desentralisasi Kabupaten Gorontalo Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Derajat Desentralisasi	Klasifikasi Derajat Desentralisasi
2017	190.428.308.121,81	1.259.472.875.908,81	15,11%	Kurang
2018	147.992.401.409,49	1.457.052.397.138,49	10,15%	Kurang

2019	155.465.564.155,41	1.499.154.604.216,41	10,37%	Kurang
2020	128.156.477.764,68	1.408.590.213.911,88	9,09%	Sangat Kurang
2021	122.467.826.370,92	1.351.193.921.844,92	9,06%	Sangat Kurang

Sumber: BKAD Kabupaten Gorontalo (Data Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat derajat desentralisasi selama tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo masih kurang dalam kemampuan desentralisasinya. Kabupaten Gorontalo masih membutuhkan pendapatan dari pemerintahan pusat untuk melakukan otonomi daerahnya. Rata-rata hasil derajat desentralisasi adalah 10,76% yang berarti tingkat desentralisasi Kabupaten Gorontalo masih kurang.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Rasio kemandirian Kabupaten Gorontalo sebesar 13,43% dan dinyatakan masih sangat rendah. Dilihat dari jumlah pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, hal ini menunjukkan ketergantungan dalam menjalankan otonomi daerah.

Rasio pertumbuhan Kabupaten Gorontalo sebesar 12,78% yang dinyatakan rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo tergolong rendah dalam merealisasikan setiap potensi pendapatan asli daerah yang muncul dari proses pertumbuhan ekonomi.

Hasil perhitungan rasio efektivitas sebesar 86,25% dengan kategori cukup efektif. Hal ini mengindikasikan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah cukup efektif.

Hasil rasio efisiensi sebesar 103,35% yang dinyatakan tidak efisien. Hal ini menandakan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo kurang efisien.

Derajat desentralisasi sebesar 10,76% dengan kategori kurang. Hal menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah masih kurang dalam pelaksanaan desentralisasinya. Kabupaten Gorontalo masih membutuhkan pendapatan dari pemerintahan pusat untuk melakukan otonomi daerahnya.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Faktor penghambat kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah pemungutan pajak dan retribusi daerah belum optimal, potensi daerah belum dimanfaatkan secara optimal serta ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo terhadap dana transfer.

Faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo adalah adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Gorontalo berusaha membuat berbagai kebijakan dalam mendukung peningkatan PAD sehingga mampu meningkatkan kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo.

IV. KESIMPULAN

Kinerja Keuangan Kabupaten Gorontalo yaitu tergolong rendah. faktor penghambatnya adalah pemungutan pajak dan retribusi daerah belum optimal, potensi daerah belum dimanfaatkan secara optimal serta ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo terhadap dana

transfer. Adapun faktor pendukungnya adanya terkait pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian ini dilakukan agar menjadi bahan penelitian selanjutnya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BKAD kabupaten gorontalo beserta jajarannya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangasertan*. Bandung: Alfabeta

Fathiyah, Masnun. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Basis Akrual Tahun 2014-2015*.

Machmud, M. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012*. Jurnal berkala ilmiah efisiensi. Vol 14, No 2.

Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.

Rahmawati, Ni Ketut Erna dan Putra, I Wayan. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012*. E-Jurnal Akuntansi, [S.L.], V. 15, N. 3, P. 1767-1795.

Ropa, Mega Oktavia. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA Vol. 4, No.2